



Judul : Soal Isu Larang Paskibraka Berhijab - Dugaan DPR, Bukan Arahan Kepala BPIP
Tanggal : Kamis, 12 September 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Soal Isu Larang Paskibraka Berhijab Dugaan DPR, Bukan Arahan Kepala BPIP

KOMISI II DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Kompleks DPR, Selasa (10/9/2024). Saat rapat, para legislator minta klarifikasi soal isu Paskibraka dilarang berhijab, yang telah dinarasikan hingga mendesak Presiden Jokowi mencopot Kepala BPIP, Yudian Wahyudi.

Menurut Yudian, dalam surat edaran yang dikeluarkan BPIP, tidak ada perintah bagi Paskibraka Putri Nasional untuk melepas hijab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Selasa (13/8/2024).

"Soal Paskibraka (dilarang berhijab) itu tidak benar. Saya tidak pernah melarang secara pribadi. Prosesnya sudah melalui mekanisme panjang. Mungkin ada pengamat yang melihat itu dan memviralkan. Secara pribadi, saya minta maaf dan berkomitmen evaluasi," katanya.

Sejumlah Anggota Komisi II DPR pun heran. BPIP sebagai garda terdepan pengawal Pancasila malah disebut-sebut melarang Paskibraka berhijab. Apalagi, latar Yudian adalah santri dan pemilik pondok pesantren.

"Saya dapat info. Katanya bukan Pak Kepala BPIP yang larang jilbab. Coba dijelaskan kronologisnya," tanya Mardani Ali Sera (F-PKS).

Senada, kecurigaan disampaikan Guspari Gaus (F-PAN). "Saya ditelepon seseorang. Membocorkan bahwa surat keputusan itu belum dicabut. Betul atau tidak? Bahwa kebijakan terkait tanggal 17 Agustus itu, apakah (dari) orang BPIP atau apa. Saya minta jawab sejujurnya," kata Gaus.

"Kami curiga itu bukan ara-

han Kepala BPIP. Ada dugaan pemaksaan karena Paskibraka ini sekarang otoritasnya BPIP," imbuhnya.

Yudian pun menjelaskan rekam jejaknya sejak kecil sebagai santri berprestasi, hingga studi ke luar negeri. Penjelasan itu untuk Riswan Tony (F-Golkar) yang mempertanyakan agama Yudian, di balik kebijakannya yang dituding selalu kontroversial.

Soal latar keislaman Yudian tadi tak diragukan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal (F-PPP). Makanya dia bingung, ada kesan BPIP melarang Paskibraka berhijab.

"Apakah Prof (Yudian) dikendalikan pihak lain di belakangnya? Saya yakin ini bukan gagasan Prof. Termasuk program kepemudaan BPIP. Bagus, tapi kok tidak ada yang akhlakul karimah sesuai *background* Prof," beber Syamsurizal.

Menjawab keresahan, Rezka Oktoberia (F-Demokrat) minta klarifikasi BPIP dibuat tertulis. Dia pun sempat menyinggung Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, untuk ikut bertanggung jawab. Termasuk soal isu pembawa baki bendera upacara HUT RI ke-79 di IKN, diganti saat *injury time*.

"Ibu tidak bisa kemudian hanya geleng-geleng (kepala). Saya tidak bisa geleng-geleng ditanya masyarakat. Tolong jawab semua dan prosedurnya," cetus Rezka.

Tanggung jawab bukan hanya untuk Kepala BPIP, juga diamini oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. "Ya, ya. Individu dan lembaga. Biarkan publik yang menilai. Cuma kami ingatkan, hati-hati. Bantu Pak Kepala," pesan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu. ■ KAL